

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Covid 19 sebagai pandemi global yang terjadi diseluruh negara di dunia oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Tertanggal 2 Maret 2020, ditetapkan bencana nasional oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo sebagai bencana nasional. Penyebaran *Covid 19* secara global genap 1 (satu) tahun, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan serta menimbulkan dampak buruk sektor keuangan perbankan, mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian dalam negeri, sehingga memperlemah daya beli masyarakat indonesia.

International Monetary Fund (IMF) kumparan bisnis tanggal 5 Juli 2020, menyatakan bahwa “Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebelum *Covid 19* adalah sebesar 5,3% dan proyeksi sesudah *Covid 19* diperkirakan menurun diantara -0,4% (kategori sangat berat) dan 2,3% (kategori berat)”. Hal ini dapat mempengaruhi penurunan aktifitas ekonomi dan memperlemah kegiatan masyarakat. Usaha mengatasi hal tersebut, diperlukannya kerjasama antara Pemerintah dan para *Stakeholders* guna pengurangan dampak *Covid 19* terhadap stabilitas keuangan. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, bahwa “Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* dan dalam

rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan”.

Menurut Heru Kristiyana (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan) pada *Suara.com* tanggal 20 Juli 2020 menyatakan “Terdapat 3 (tiga) potensi risiko bagi sektor perbankan dimasa pandemi yaitu pertama, risiko kredit yang akan terjadi apabila Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) gagal memenuhi kewajiban kreditnya, kedua risiko kredit terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) yakni risiko perbankan jika nasabah tidak mampu membayar kewajibannya, dan yang ketiga adalah risiko *likuiditas*, jika debitur gagal memenuhi kewajibannya maka hal tersebut akan berdampak pada arus kas perbankan”.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan keputusan Perlindungan Konsumen JOK (11/PJOK.03/2020) menyebutkan “Stimulasi Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Corona Virus Disease 2019* guna meminimalisir risiko perbankan”. Menurut Ridayati et al (2020) menyatakan terdapat 2 (dua) kebijakan stimulus yaitu pertama penilaian terhadap kualitas besarnya kredit yang akan disalurkan, penilaian dana yang akan dibiayakan, penilaian tersedianya dana yang dinilai menurut ketepatan pelunasan dana pokok beserta besarnya bunga atas pemberian kredit dengan batas plafon 10 Milyar.

Kebijakan kedua yaitu kebijakan *restrukturisasi* (keringanan untuk membayar cicilan hutang) dengan meningkatkan besarnya kredit yang

dibiayai berubah lancar setelah di *restrukturisasi* pada masa berlakunya PJOK. Kebijakan Bank tersebut ditetapkan tanpa mempertimbangkan jenis debitur serta limit plafon.

Menurut Yamali (2020) dan Bidari (2020) menyatakan bahwa tindakan sigap dampak *covid 19* yang dilakukan Bank Indonesia untuk menstabilkan perputaran keuangan serta jual beli valas yaitu pihak perbankan menyediakan pembiayaan sebagai salah satu dari kebijakan moneter seperti : Pertama menurunkan besarnya bunga menjadi 25 *basis poin* (BPS), dengan harapan mampu mendorong pembiayaan sehingga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di masa pandemi. Kedua pemantauan perkembangan perekonomian global agar nilai tukar rupiah stabil serta pemantauan injeksi likuiditas rupiah dan valas dalam jumlah besar selama pandemi. Ketiga mempermudah aturan *Domestik Non Deliverable Forward* (DNDF) dengan tujuan mampu mendorong pasar valuta asing.

Pandemi *Covid 19* mengakibatkan banyak perusahaan perbankan melakukan kebijakan manajemen laba. “Tindakan pengambilan keputusan manajer dengan tujuan mengatur dan mengelola naik-turunnya profitabilitas pada waktu pelaporan keuangan” (Sulistyanto, 2008:49). “*Earnings management is the manager’s decision to choose certain accounting policies that are considered able to achieve the desired goals, both to increase profit and reduce the level of reported losses*” (Scott, 2015:445). Hal ini menguraikan bahwa keputusan manajer dalam pengambilan kebijakan akuntansi berupa tindakan manajemen laba merupakan harapan agar

peningkatan keuntungan dapat tercapai serta mampu mengurangi besarnya kerugian yang akan disajikan dalam bentuk pelaporan. Menurut Suyono (2017) menguraikan manajemen laba adalah tindakan manajemen perusahaan merubah struktur transaksi laporan keuangan setelah dilakukan pertimbangan kebijakan waktu pelaporan. Saat target laba belum berhasil dicapai, maka manajemen akan melakukan tindakan memodifikasi pemilihan metode akuntansi agar memperlihatkan pencapaian keuntungan yang meningkat, sehingga kinerja perusahaan nampak baik.

Dilakukannya tindakan manajemen laba merupakan salah satu alasan perbankan dalam menghadapi ketatnya sistem regulasi perbankan bila disandingkan dengan industri lain. Menurut Nasution (2007) mengidentifikasi dilakukannya manajemen laba karena pihak bank berkewajiban memenuhi kriteria CAR (*Capital Adequacy Ratio*) sebagai kemampuan besarnya modal yang dimiliki digunakan sebagai penampungan risiko kerugian, jika kemungkinan dihadapi Bank dimana kriteria CAR tersebut diisyaratkan oleh Bank Indonesia.

Beberapa penyebab manajer perbankan mengambil tindakan manajemen laba adalah pengaruh dari Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Dividend Payout Ratio*. Penyebab pertama yaitu ukuran perusahaan. Dimana penentuan ukuran perusahaan ditunjukkan dari kepemilikan aset, besarnya omset penghasilan, perolehan keuntungan, biaya pajak yang ditanggung (Aji, 2018). Tindakan manajemen laba memegang peranan penting dengan melihat ukuran dari perusahaan. Bagi perusahaan yang berukuran kecil sebagian besar

lebih banyak melaksanakan manajemen laba, dikarenakan perusahaan dengan kepemilikan aset usaha kecil ingin memperlihatkan kondisi kinerja sebaik mungkin dengan harapan agar para pemegang saham dengan mudah mempercayakan penanaman modal untuk dikelola pada perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan besar, karena lebih diamati dan dimonitoring serta menjadi perhatian publik terlebih oleh para pemegang saham, maka perusahaan berukuran besar lebih selektif dalam pelaporan keuangan. Perusahaan besar kurang termotivasi untuk mempraktikkan tindakan manajemen laba disebabkan para penanam modal serta masyarakat umum dianggap lebih kritis jika dibandingkan dengan penilaian pada perusahaan berukuran kecil (Tirayoh et al, 2014).

Penyebab kedua manajer melakukan manajemen laba adalah profitabilitas. Tujuan paling utama kegiatan operasional perbankan adalah memaksimalan perolehan keuntungan. Profitabilitas diartikan sebagai strategi yang dimiliki perbankan dalam mendapatkan keuntungan dengan pengeluaran biaya yang relatif kecil. Dilihat secara umum, perolehan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan perbankan diperoleh dari jasa simpan pinjam nasabah serta bunga atas kredit yang diberikan perusahaan perbankan. Keterkaitan manajemen laba dengan profitabilitas yaitu saat tingkat profitabilitas yang dihasilkan perusahaan perbankan menurun selama kurun waktu pelaporan, menyebabkan perlakuan manajemen laba oleh pihak manajemen melalui peningkatan perolehan penghasilan dengan begitu para pemegang saham tetap bertahan dan yakin bahwa nilai saham nampak lebih

besar. Menurut Rahman dan Isnuwardhana (2019) menyatakan bahwa pelaporan laba yang tinggi oleh Manajer bertujuan untuk menyakinkan investor bahwa periode mendatang diyakini terjadi peningkatan pengelolaan manajemen secara baik dan mampu menaikkan nilai penawaran surat berharga. Sedangkan perusahaan mengalami profitabilitas menurun akan termotivasi melaksanakan kebijakan tindakan manajemen laba (Faisal et al, 2018).

Dividend Payout Ratio (DPR) merupakan penyebab ketiga manajer melakukan manajemen laba. Menurut Murni (2019) menjelaskan DPR adalah pendistribusian laba untuk investor sama dengan besarnya nilai lembar saham. Martha et al (2018) mengidentifikasi bahwa kebijakan pembagian *dividend payout ratio* adalah penentuan besarnya pembagian keuntungan kepada investor serta kemungkinan akan ditahan pihak manajemen guna investasi periode berikutnya. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan penentu kebijakan pembagian *dividend*. Pembayaran *dividend* kepada para pemegang saham berpotensi pada permasalahan penguntungan diri sendiri oleh Manajer. Hal tersebut dapat mengurangi tindakan dari manajer dalam penguntungan diri sendiri serta merugikan para investor. Terciptanya potensi permasalahan dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan disebut *teory keagenan* (Yushita, 2010). Pemberian *dividend* yang rutin menunjukkan bahwa perusahaan berpotensi mengelola manajemen berjalan baik, sehingga risiko yang akan dihadapi kemungkinan kecil jika

disandingkan pada perusahaan yang kurang rutin pembagian *dividend* (Dewi dan Hermi, 2016).

Seperti yang telah dikemukakan diatas, adanya perbedaan besar kecilnya ukuran perusahaan, naik turunnya profitabilitas yang akan didapatkan serta pembagian *dividend payout ratio* yang nantinya akan diterima oleh masing-masing investor memberikan peluang manajer untuk melakukan manajemen laba, untuk menghindari hal tersebut diperlukan praktik *corporate governance* guna mencegah manajemen laba yang berlebihan.

Menurut Aluchna dan Idowu (2017) serta Sunrowiyati et al (2019) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan hubungan berbagai pihak dalam tata kelola manajemen perusahaan sebagai penentu arah serta program strategis pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik mampu meminimalisir permasalahan keagenan dan mampu memaksimalkan pemecahan permasalahan dalam pembatasan asimetri informasi. Menurut Yamaditya dan Raharja (2014) mendefinisikan asimetri informasi merupakan tindakan manajer untuk mengakses informasi mengenai keadaan, prospek perusahaan, yang mana informasi tersebut tidak dimiliki oleh pihak luar.

Berdasarkan Böhmer (2009) dalam *Organisation for Economic Cooperation And Development* (OECD) berisi “Organisasi kerja sama dan pembangunan ekonomi menyatakan bahwa terdapat struktur *corporate governance* tentang hak serta tanggungjawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam melakukan bisnis yaitu Komisaris Dewan, Jajaran Direksi, Manajer

Perusahaan, Para Pemegang Saham serta *Stakeholders*”. Terdapat 2 (dua) faktor utama penekanan dalam melakukan *corporate governance*, pertama pentingnya perolehan informasi dengan benar dan tepat waktu merupakan hak pemegang saham. Kedua, kewajiban perusahaan menjalankan kinerja perusahaan, pengelolaan kepemilikan dan sebagai *stakeholders* melakukan pemecahan permasalahan dengan cara bijaksana, bertanggungjawab serta transparan atas semua informasi yang akan disebarakan.

Obyek peneliti yaitu sektor perbankan terpublish di BEI. Kaitannya dengan pandemi *Covid 19* maka peneliti menggunakan data pelaporan keuangan tiga bulanan, selama tahun pertama *Covid 19* yaitu 2 (dua) periode yaitu 2019 dan 2020. Menurut Kasmir (2011:3) menyatakan bahwa “Perusahaan perbankan merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana menyalurkannya kembali dana berupa penyaluran dana, pemberian pinjaman kredit serta penghimpunan dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan”. Sektor perbankan merupakan perusahaan yang diatur oleh Bank Indonesia, dimana Laporan keuangan digunakan Bank Indonesia sebagai penentu bank dinyatakan sehat atau tidak. Menurut Indrawati (2011) menyatakan bahwa perusahaan mampu memenuhi syarat oleh Bank Indonesia sebagai bank yang sehat, dengan cara melakukan tindakan manajemen laba.

Berdasarkan pertimbangan peneliti terdahulu dari berbagai penelitian seperti Jayanti (2018) bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh pada manajemen laba sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada

manajemen laba, hasil tersebut sama dengan (Kartika dan Dwi, 2015) serta (Zeptian dan Rohman, 2013) menghasilkan yaitu ukuran perusahaan juga memiliki pengaruh pada manajemen laba, tetapi hasil tersebut berbanding terbalik pada peneliti Florencia dan Susanty (2019) serta Arifin (2016) yang menyebutkan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba.

Berdasarkan Pradipta (2019) serta Suaidah dan Utomo (2018) profitabilitas memiliki pengaruh pada manajemen laba, namun Lestari dan Wulandari (2019) serta Jayanti (2018) menghasilkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba. Hasil Silalahi (2020) serta Hasty dan Herawaty (2017) untuk *dividend payout ratio* berpegaruh pada manajemen laba. Hasil tersebut tidak sejalan dengan (Wirawati, 2018) menghasilkan *dividend payout ratio* tidak memiliki pengaruh pada manajemen laba.

Pada Ruwanti et al (2019) menepatkan tata kelola proksi dari *corporate governance* memoderasi pada CSR (*Corporate Social Responsibility*) hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba menegaskan bila *corporate governance* terbukti belum mampu memoderasi pengaruh CSR, ukuran perusahaan pada manajemen laba. Sama dengan Riska Astari serta Suputra (2019) *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terbukti memoderasi hubungan *dividend payout ratio* pada manajemen laba. Berbanding terbalik dengan hasil dari Jayanti (2018) *corporate governance* dengan proksi kepemilikan manajerial, bahwa kepemilikan manajerial

terbukti mampu memperkuat profitabilitas, *dividend payout ratio*, ukuran perusahaan pada manajemen laba. Sama dengan Satya serta Amertha (2013) *corporate governance* juga memperkuat profitabilitas pada manajemen laba.

Berdasarkan permasalahan diatas *corporate governance* dijadikan peneliti sebagai variabel moderasi melalui proksi Kepemilikan Institusional. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh pada kinerja perusahaan (Murwaningsari, 2006). Kebijakan dilakukannya monitoring perusahaan oleh Pihak Insitusional diharapkan bisa memotivasi pihak manajemen agar memperhatikan pengelolaan manajemen perbankan, dengan begitu pelaku *opportunistic* yang mempunyai tujuan mementingkan diri sendiri akan berkurang. Kaitanya dengan berbagai paparan diatas, untuk menguji peran *corporate governance* dalam hubungannya dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan *dividend payout ratio* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020), peneliti membahas penelitian dengan judul “**Determinasi Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Dividend Payout Ratio terhadap Manajemen Laba dengan Variabel Moderasi Corporate Governance**”.

1.2 Rumusan Masalah

Merujuk permasalahan di atas, sehingga rumusan masalah yang terkandung adalah :

1. Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, *dividend payout ratio* memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020)?
2. Apakah *corporate governance* memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020)?
3. Apakah *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *dividend payout ratio* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti dapat membuktikan secara empiris mengenai:

1. Determinasi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *dividend payout ratio* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020).
2. Determinasi *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020).
3. Determinasi *corporate governance* dengan proksi kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *dividend payout ratio* terhadap manajemen laba pada

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun pertama *Covid 19* (2019-2020)?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Nantinya dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya dengan menggunakan tema penelitian sebagai salah satu bahan acuan.
2. Sebagai bahan sarana informasi bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan saat berhubungan penentuan pemilihan saham.
3. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan perbankan sebagai penentuan arah kebijakan pengambilan tindakan manajemen laba yang baik selama tahun pertama pandemi *covid 19* yang sedang dirasakan sektor perbankan, serta diharapkan dapat memberikan informasi laba dan pembagian *dividend* yang akurat dengan memperkecil praktik manajemen laba.mengambil keputusan.

